

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Agus Dwi Yanto, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Alexander Hamilton, 1995, *Federalist 78. In The Federalist Papers*, Mentor, New York
- Arifin Tahir, 2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Pustaka Indonesia Press, Jakarta
- Arikumto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta
- A. Ubaidillah, dkk, 2006, *Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICC UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta.
- Bambang Sugeng & Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta : Kencana,
- Bappenas dan Depdagri , 2002, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, Bappenas dan Depdagri, Jakarta.
- Depdagri-LAN, 2007, *Modul Kebijakan Publik, Diklat Teknis Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Service Delivery, Accountability, and Quality Management)*, LAN, Jakarta.
- Hendra Karinga, 2011, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Alumni, Bandung
- Herdiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta.
- Johan, Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, ( Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2004)
- Moenir, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- M.Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Graha Anugerah
- Nico Andrianto, 2007, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Bayumedia Publishing, Malang
- Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian, 2013, *Tata Cara Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi*, Kementerian Perindustrian, Jakarta
- Rachmadi Usman. 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2003, *Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono , 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Subagiyo, Henri dkk, 2009, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- SW, Maria Sumardjono, 2014, “Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”, *Bahan Kuliah*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syahrizal Abbas. 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana

Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.

W. Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yunita Anggarini, dkk, 2010, *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

### **Tesis/Desertasi**

Arief Aditya Lukman, “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik”, *Tesis*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2016.

Anwar Usman, “Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman” *Desertasi*, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010.

Dewi Eliza Kusumaningrum, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pencari Keadilan”, *Tesis*, Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016

Isharyanto, “Instrumentalisme Hukum dalam Ruang Politik (Pelaksanaan *Constitutional Review* dan Implikasinya Terhadap Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia)”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2014.

Tegar Harbriyana Putra, “Kajian Model Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Analisis Putusan BPSK dan Putusan Banding Pengadilan Negeri Sragen)”, *Tesis*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2015.

Siti Fatimah, “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

### **Jurnal/ Makalah/Artikel**

Adi Sulityono, “Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Pada Tanggal 17 November Tahun 2007.

- Adi Sulityono, “Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September 2005.
- Aini Rahmania dan Udiyo Basuki, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara Tahun 2013”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014.
- Ahmad Subhan, “Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah Dalam Mendukung Transparansi Pemerintahan (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi)”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.21 Nomor 3 September 2016.
- Andi Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah”, *Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah*, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016
- Asshiddiqie, Jimly “*Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*”, Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta, 2000, hlm.1. Lihat juga Erman Suparman, “Pendidikan Hukum Berkarakter Sebagai Dasar Pembentukan Hakim Masa Depan”, *Makalah*, Acara Penandatanganan MOU antara Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bedah buku Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Kamis 28 Mei 2013.
- Bayu Dwi Anggono, “The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation “, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 4 , April 2016.
- Enrico Simanjuntak, “Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung*, Vol.3, Nomor 2 Juli Tahun 2014. Baca juga Yulius, “Pengaturan dan Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara dalam Rangka Pengembangan Hukum Nasional”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bandung Tahun 2016.
- Fajar Laksono Soeroso, “Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN\_JKT” *Jurnal Yudisial Komisi Yudisial*, Vol.6 No.3 Desember Tahun 2013.

- Hernadi Affandi, “Problematisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Hegemoni Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 Tahun 2014.
- Hermansyah dan Imran (ed), 2013, *Putih Hitam Pengadilan khusus*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Hermansyah dan Imran (ed), 2013, *Problematisasi Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Hermansyah dan Imran (ed), 2013, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Inosentius Samsul, 2009, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 4. Baca juga Dri Utari Christina R dan Ismail Hasani (Ed), 2013, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Setara Press, Jakarta.
- Nunuk Febrianingsih, “Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 Nomor 1, April 2012.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Laporan Penelitian, Jakarta.
- Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.3 September 2014.
- Rizqan Naelufar, “Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik”, *Unnes Law Jurnal*, Vol. 2, No.1 Tahun 2013.
- Slamet Haryanto, “Peran Komisi Informasi Publik Dalam Proses Eksekusi Terhadap Putusan Sengketa Informasi Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tinjauan Uu No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.1 No.2 tahun 2016.
- Syafaat, “Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Hal Putusan Komisi Informasi Publik Tidak Dapat Dilaksanakan”, *Artikel*, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang, 2011.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Wicpto Setiadi, “Dinamika Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Bahan Kuliah Hukum Peraturan Perundang-Undangan Magister Hukum Tahun 2017*. Baca juga Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

### **Perundang - Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8486.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **Internet**

Komisi Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta, “Daftar Putusan Sengketa Informasi”, <https://komisi-informasi.jogjaprov.go.id/sengketa/daftarputusan/>, diakses pada Tanggal 11 Mei 2018, Pukul 20.00 WIB.

### **Wawancara**

Andriyani, *Personal interview*, 20 Agustus 2018

Budhi Masthuri, *Personal interview*, 13 September 2018

Dewi Amanatun Suryani, *Personal interview*, 27 Agustus 2018.

Fuad, *Personal interview*, 10 September 2018.

Hazwan Iskandar Jaya, *Personal interview*, 2 September 2018 .

Novy Dewi Cahyati, *Personal interview*, 27 September 2018.

Sundari, *Personal interview*, 19 September 2018.